BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia merupakan hal penting yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia atau bisa disingkat dengan IPM mengombinasikan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (dilihat dari angka harapan hidup), pendidikan (dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta tingkat pendapatan yang diukur dari daya beli masyarakat. IPM memiliki peran strategis dalam menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia yang lebih holistik, di mana aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan menjadi parameter yang saling berkaitan.[2]

IPM merupakan indikator komposit yang meskipun tidak mampu mengukur semua aspek pembangunan manusia, tetap mampu mengevaluasi tiga dimensi utama yang dianggap mewakili kemampuan dasar penduduk. Tiga dimensi ini diharapkan dapat mencerminkan kemampuan mendasar yang dimiliki oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan.[3]

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, salah satunya ketimpangan sosial-ekonomi masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk

[2] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, (jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hal. 10

[3] Dede Afri Maidoni, Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di provinsi Riau, Vol II No.02, 2015, hal. 1-2

dan angka harapan lama sekolah memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat yang kemudian tercermin dalam nilai IPM.

Pembangunan yang hakiki itu adalah pembangunan yang berimplikasikan peningkatan kualitas manusia bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan menjadi tidak berarti jika masyarakat tidak ikut andil dalam keseluruhan proses pembangunan. Rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan, tetapi juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.[4]

Dalam Islam, pembangunan manusia tidak hanya diukur melalui capaian materi, tetapi juga mencakup aspek moral, etika, dan keberkahan dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip-prinsip seperti *ta'awun* (kerjasama), *adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan umum) menjadi pedoman dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mengelola populasi dan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut ilmu ekonomi Islam, pertumbuhan tidak hanya berarti meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi juga menumbuhkan pandangan positif yang mengangkat semangat seseorang. bukan hanya kebutuhan materi tetapi juga kebutuhan spiritual. Dalam ini, letak pembangunan ekonomi islam merupakan konsep yang mengidentifikasi dan menyarankan strategi pembangunan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta

[4] BPS, "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2023," vol 6, 2023, hal. 17

meneliti dan menganalisis proses pembangunan dan unsur-unsur yang mempengaruhinya.[5]

Berikut gambar Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2023.

Grafik 1.1
Data IPM Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023

Data diperoleh dari jatim.bps.go.id

Diketahui bahwa IPM Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dilihat bahwa pada tahun 2021 sebesar 72,14% mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 72,7% dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 73,38%. Namun dibelakang itu terdapat hal yang harus ditangani terkait tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, dan angka harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Timur.

Tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih menjadi tantangan signifikan. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan masyarakat kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk dalam hal pengembangan kualitas manusia. Kemiskinan adalah keadaan di mana banyak orang mengalami keterbatasan, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang tinggi, atau makanan yang

[5] Irfan Syauqi Beik dan Layli Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah, edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 13

cukup. Kondisi ini dapat memengaruhi IPM di suatu daerah, karena kemiskinan menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat tinggal, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.[6]

Menurut Alhudhori, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu membeli kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketiadaan tempat tinggal, ketidakmampuan untuk mendapatkan perawatan medis, tidak bisa bersekolah, serta ketidakmampuan membaca dan menulis. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan dalam berbagai aspek yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.[7]

Grafik 1.2
Data Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023

Data diperoleh dari jatim.bps.go.id

[6] Chalid, N., & Yusuf, Y, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimun Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi*, Vol 22, No (2), 2014, hal. 3

[7] Lora Ekana Nainggolan, dkk, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Permbangunan Manusia Yang Berdampak pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara", *Open Jurnal System*, Vol. 15, No. 10, 2021, hal. 54

Dari gambar tersebut diketahui bahwa tingkat kemiskinan tahun 2021 sebesar 11,4%, tahun 2022 mengalami penurunan dengan hasil 10,38% dan tahun 2023 mengalami penurunan lagi dengan hasil 10,35%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun angka kemiskinan di Jawa Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun persentasenya masih cukup tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia.

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi IPM. Pengangguran mencerminkan ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada tingkat pendapatan individu, tetapi juga menurunkan kontribusi produktivitas secara keseluruhan di wilayah tersebut. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau tidak dapat mengakses lapangan kerja yang layak, mereka tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi dan layanan kesehatan yang lebih baik.[8]

Grafik 1.3
Data TPT Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023

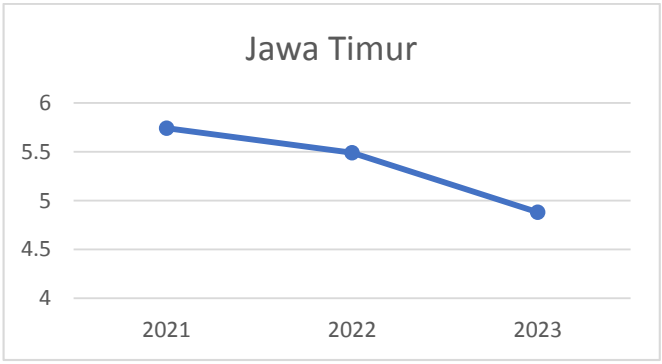

Data diperoleh dari jatim.bps.go.id

[8] Kemnaker, *Laporan Nasional Pengangguran Terbuka 2023*, (Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2023), hlm. 21

Dari gambar tersebut diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 5,74%, tahun 2022 mengalami penurunan dengan hasil 5,49%, dan tahun 2023 mengalami penurunan lagi dengan hasil 4,88%. Meskipun angka 4,88% pada tahun 2023 masih menunjukkan bahwa ada sebagian penduduk yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga bisa menjadi indikasi adanya tantangan struktural dalam pasar kerja, seperti kesenjangan keterampilan, atau kurangnya lapangan pekerjaan di daerah tertentu.

Selain itu, jumlah penduduk juga merupakan faktor penting yang memengaruhi IPM. Pertumbuhan penduduk yang cepat di Jawa Timur menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang memadai, seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar lainnya. Ketika jumlah penduduk bertambah dengan cepat tanpa diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan layanan publik, hal ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Di Jawa Timur, peningkatan jumlah penduduk sering kali tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan sosial yang memadai, sehingga berdampak negatif terhadap IPM.[9]

Dalam konteks pembangunan, penduduk dipandang sebagai sumber daya utama dalam modal pembangunan. Penduduk berperan secara aktif maupun tidak langsung dalam keseluruhan proses pembangunan. Peran serta keterlibatan penduduk sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas mereka.

[9] Lestari, F "Jumlah Penduduk dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Manusia di Jawa Timur." *Jurnal Demografi dan Kependudukan Indonesia*, Vol 1, No (3), 2023, hal. 145-160.

Jumlah penduduk yang stabil serta pertumbuhan yang terkendali merupakan elemen penting untuk keberlanjutan pembangunan, sedangkan kualitas penduduk yang tinggi menjadi fondasi utama bagi peningkatan kemajuan pembangunan.[10]

Namun, penelitian oleh Suryani menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi berpotensi menurunkan kualitas pembangunan manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk dapat menurunkan IPM.[11]

Grafik 1.4
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023

Data diperoleh dari jatim.bps.go.id

Dari gambar tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk sebesar 40.878.789 menjadi 41.149.974 di tahun 2022, dan kemudian

[10] Dastanta Irvan Ginting, Irsad Lubis, "Pengaruh Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal Bisnis Net*, vol 6, no 2, hal. 520

[11] Suryani Dina, "Pertumbuhan Penduduk dan Dampaknya Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia di Indonesia", *Jurnal Demografi Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 63.

meningkat lagi menjadi 41.416.407 di tahun 2023. Seiring bertambahnya penduduk, ada peningkatan kebutuhan akan lapangan kerja, yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran bila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap IPM yaitu pertumbuhan ekonomi. Sekalipun tingkat pertumbuhan PDB suatu negara melebihi pertambahan jumlah penduduknya, negara tersebut masih dapat dianggap mengalami pertumbuhan ekonomi yang solid. Hal ini terjadi ketika kesejahteraan masyarakat mendapat manfaat dari pertumbuhan PDB. Karena meningkatkan standar hidup masyarakat melalui peningkatan produksi per kapita, investasi fisik, investasi sumber daya manusia, dan lapangan kerja adalah inti dari pembangunan.[12]

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu aspek fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan dan keadilan sosial (al-'adalah al-ijtima'iyyah). Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus mendorong tercapainya *maqashid syariah*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak semata-mata diukur dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari bagaimana distribusi kekayaan dan

[12]Nuraeni Handayani, Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019, *Juournal of Economics,* Vol. 11, No. 1, Hlm. 26, 2022

kesejahteraan tersebut mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. [13]

Grafik 1.5
Data Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023

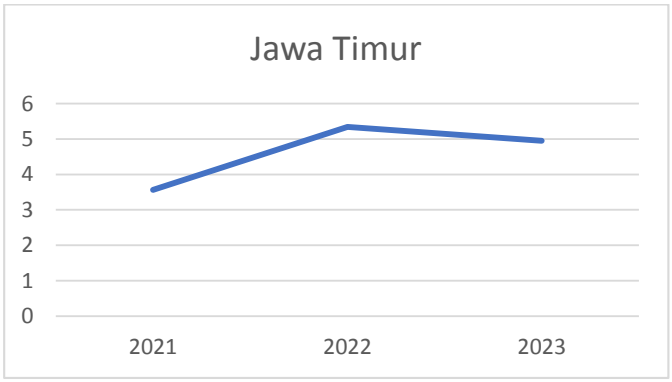

Data diperoleh dari jatim.bps.go.id

Dari gambar tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,56% meningkat menjadi 5,34% di tahun 2022, dan kemudian mengalami penurunan menjadi 4,95% di tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu linear, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal (seperti kebijakan daerah dan investasi lokal) maupun eksternal (seperti kondisi global dan nasional).

Pada dasarnya dari semua data yang diperoleh terdapat ketimpangan antara kabupaten/kota sehingga terdapat disparitas antar wilayah dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Kesenjangan ini dapat memengaruhi rata-rata IPM di seluruh provinsi. Penelitian ini menjadi bentuk tantangan bagi Jawa

[13] Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 87.

Timur dalam meningkatkan IPM adalah bagaimana mengatasi faktor-faktor ini secara efektif. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran secara lebih terstruktur, serta mengelola jumlah penduduk. Sinergi antara kebijakan ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia menjadi kunci utama dalam meningkatkan IPM Jawa Timur, yang tidak hanya akan memperbaiki kondisi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan uraian di atas tentang IPM, maka peneliti ingin meneliti secara mendalam dengan judul penelitian "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas, dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam?

4. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam?
5. Apakah terdapat pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan

1. Untuk menguji pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam.
3. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam.
4. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam.
5. Untuk menguji pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dijelaskan sebgaai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitihan ini diharapkan bisa memperkaya kajian ekonomi pembangunan, khususnya dalam memahami hubungan antara kemiskinan, pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

   b. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam terkait interaksi antara variabel-variabel sosial-ekonomi lainnya terhadap IPM, atau memperluas objek kajian ke wilayah lain.

   c. Bagi Akademik

      Hasil penelitian ini dapat menambah literatur akademik di perpustakaan kampus, yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen sebagai referensi dalam pembelajaran dan penelitian.

E. Identifikasi Masalah

Permasalahan Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan yang tinggi akan membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik, sehingga menghambat peningkatan IPM.
2. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan, yang pada gilirannya mempengaruhi IPM.
3. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi tantangan dalam penyediaan infrastruktur, lapangan kerja, layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai sehingga potensi peningkatan IPM bisa terganggu.
4. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan distribusi menjadi salah satu penyebab ketertinggalan IPM di beberapa daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan

1. Ruang Lingkup

   Dalam penelitian ini perlu adanya ruang lingkup dan ketebatasan penelitian, dengan ini peneliti mengetahui bahwa dimana dia akan membatasi ruang yang akan dia teliti dan juga berdasarkan ruang lingkup yang ada. Ruang lingkup pada penelitihan ini berfokus pada variabel X (independent) terhadap variabel Y (dependent).

2. Keterbatasan

   Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengambil data tahun 2021-2023 untuk dijadikan sampel.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang diambil berdasarkan teori ahli yang sinkron mrnggunakan tema yang diteliti, adapun istilah konseptual pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Tingkat kemiskinan adalah jumlah seseorang dalam suatu kondisi yang menggambarkan ketiadaan kepemilikan dan rendahnya penghasilan yang secara spesifik menunjukkan situasi dimana kebutuhan dasar manusia sepeti pakaian, makanan dan tempat tinggal tidak dapat terpenuhi.[14]

b. Tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya.[15]

c. Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara dan merupakan input potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan suatu produksi rumah tangga.[16]

---

[14] Ardito Bhinandi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA,2017), hal.9

[15] Lisa Marini dan Novi Tri Putri, "Peluang Terjadinya Pengangguran di Provinsi Bengkulu: Seberapa Besar?", *The Journal of Economic Development*, vol 1, no 1, 2019, hal. 75

[16] Novri Silastri, "Pengaruh Jumlah Penduduk dan pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi", *JOM Fekom*, vol 4, no 1, 2017, hal. 106

d. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya secara berkelanjutan.[17]

e. Indeks pembangunan manusia adalah indikator komposit untuk mengukur pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia.[18]

2. Definisi Operasional

a. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar minimum yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Total Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}} \text{ x } 100$$

Di mana jumlah penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan.[19]

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Rumus perhitungan tingkat pengangguran terbuka:[20]

---

[17] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan.* Jakarta: Kencana, 2011, hal. 33.

[18] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2020*, dalam https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html, diakses 24 September 2024

[19] Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2023), hal. 5-7.

[20] Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*, (Jakarta: BPS, 2023), hal. 18-20.

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \text{ x } 100$$

c. Jumlah penduduk adalah total individu yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu, mencakup penduduk yang menetap secara permanen maupun sementara. Formula dasar untuk proyeksi penduduk: $P_t = P_0 + (L-M) + (I-E)$.[21]

   Keterangan:

   P_t: Jumlah penduduk pada waktu t

   P_0: Jumlah penduduk awal

   L: Jumlah kelahiran

   M: Jumlah kematian

   I : Imigrasi

   E: Emigrasi

d. Pertumbuhan ekonomi sebagai tingkat perubahan atau peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil dari tahun ke tahun pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan formula:[22]

$$\text{TPE} = \frac{\text{PDB Tahun ini} - \text{PDRB tahun sebelumnya}}{\text{PDRB tahun sebelumnya}} \text{ x } 100\%$$

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM memberikan gambaran umum tentang

[21] Badan Pusat Statistik, *Metode Penghitungan dan Proyeksi Penduduk 2020*, (Jakarta: BPS, 2020), hal. 7-9.

[22] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan…,* hal. 33

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Adapun cara perhitungannya adalah:[23]

$$\text{IPM} = (\text{I}_{\text{Harapan Hidup}} \text{ x } \text{I}_{\text{Pendidikan}} \text{ x } \text{I}_{\text{Pengeluaran}})^{\frac{1}{3}}$$

H. Sitematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitihan menggunakan pedoman skripsi dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang terdiri dari enam bab maka dari itu peneliti menerapkan sistematika kepenulisan memuat tentang keseluruhan isi penelitian meliputi bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir sesuai dengan buku pedoman skripsi dari UIN Satu Tulungagung.

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi meliputi sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama skripsi ini merupakan bagian isi dari penelitian yang terdiri dari beberapa subab yaitu:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah (jika diperlukan), manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

---

[23] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2022*, (Jakarta: BPS, 2022), hal. 10-15.

Bab II: Kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, krangka berpikir teoritis atau paradigmatic (jika diperlukan).

Bab III: Metode penelitian yang teridiri dari pendekatan dan jenis penlitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan yang berisi analisis dengan melakukan konfirmasi dan sitesis hasil penelitian dan teori penelitian yang ada.

Bab VI: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saan berdasarkan hasil penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini berisi uraian daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.